



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 060 / 459 /TAHUN 2022

TENTANG

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sehingga diketahui kebutuhan jumlah dan jenis jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 106);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan kepegawaian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 AUG 2022
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 060 / 459 /TAHUN 2022
 TENTANG
 KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS
 JABATAN APARATUR SIPIL
 NEGARA PADA DINAS PERTANIAN
 DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS

KEBUTUHAN JUMLAH DAN JENIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
 KABUPATEN BANYUMAS

No.	Nama Jabatan	Jenis Jabatan	Kebutuhan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Dinas	JPT Pratama	1
2.	Pengawas Alat dan Mesin Pertaniann - Ahli Madya	Fungsional	1
3.	Analisis Ketahanan Pangan - Ahli Madya	Fungsional	1
4.	Analisis Pasar Hasil Pertanian - Ahli Madya	Fungsional	2
5.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian - Ahli Madya	Fungsional	1
6.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian - Ahli Madya	Fungsional	1
7.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Ahli Madya	Fungsional	2
8.	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman/Analisis Perkarantinaan Tumbuhan - Ahli Madya	Fungsional	1
9.	Penyuluh Pertanian - Ahli Madya	Fungsional	32
10.	Perencana - Ahli Madya	Fungsional	1
11.	Sekretaris Dinas	Administrator	1
12.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksana	1
13.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Pelaksana	1
14.	Pengelola Data	Pelaksana	1
15.	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	Pelaksana	1
16.	Analisis Kepegawaian/Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur - Ahli Pertama	Fungsional	1

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	Arsiparis - Ahli Pertama	Fungsional	1
18.	Perencana - Ahli Muda	Fungsional	2
19.	Perencana - Ahli Pertama	Fungsional	1
20.	Pranata Hubungan Masyarakat - Ahli Pertama	Fungsional	1
21.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pengawas	1
22.	Bendahara	Pelaksana	1
23.	Penyusun Laporan Keuangan	Pelaksana	1
24.	Pengelola Gaji	Pelaksana	1
25.	Verifikator Keuangan	Pelaksana	2
26.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	8
27.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengawas	1
28.	Analisis Organisasi	Pelaksana	1
29.	Pengelola Kepegawaian	Pelaksana	2
30.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	2
31.	Pranata Kearsipan	Pelaksana	1
32.	Pengadministrasi Kepegawaian	Pelaksana	1
33.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	12
34.	Pengadministrasi Persuratan	Pelaksana	1
35.	Pengemudi	Pelaksana	7
36.	Petugas Keamanan	Pelaksana	20
37.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	4
38.	Pramu Bakti	Pelaksana	1
39.	Arsiparis - Terampil	Fungsional	2
40.	Pranata Komputer - Terampil	Fungsional	2
41.	Pranata Hubungan Masyarakat - Terampil	Fungsional	2
42.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Administrator	1
43.	Analisis Potensi Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	Pelaksana	1
44.	Analisis Potensi Budidaya Serelia	Pelaksana	1
45.	Penyusun Teknis Usaha Budidaya	Pelaksana	1
46.	Pengelola Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pelaksana	2
47.	Pengelola Budidaya dan Pengembangan Tanaman Pangan	Pelaksana	1
48.	Analisis Pasar Hasil Pertanian - Ahli Pertama	Fungsional	2
49.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	0
50.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Terampil	Fungsional	2
51.	Penyuluh Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	2

(1)	(2)	(3)	(4)
52.	Penyuluh Pertanian - Ahli Pertama	Fungsional	2
53.	Kepala Bidang Perkebunan dan Perlindungan Tanaman	Administrator	1
54.	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	Pelaksana	1
55.	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan	Pelaksana	2
56.	Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	Pelaksana	1
57.	Pengelola Organisme Pengganggu Tanaman	Pelaksana	2
58.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	0
59.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Terampil	Fungsional	2
60.	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman/Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan - Ahli Muda	Fungsional	2
61.	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman/Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan - Ahli Pertama	Fungsional	2
62.	Penyuluh Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	2
63.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian	Administrator	1
64.	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	Pelaksana	1
65.	Analisis Pembiayaan Pertanian	Pelaksana	1
66.	Analisis Lahan Pertanian	Pelaksana	1
67.	Analisis Pengembangan Infrastruktur	Pelaksana	1
68.	Pengawas Pupuk dan Pestisida	Pelaksana	1
69.	Pengelola Tata Guna Lahan Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	Pelaksana	2
70.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	1
71.	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian - Ahli Pertama	Fungsional	1
72.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	1
73.	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian - Ahli Pertama	Fungsional	1
74.	Penyuluh Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	1
75.	Penyuluh Pertanian - Ahli Pertama	Fungsional	1
76.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Administrator	1
77.	Analisis Pangan	Pelaksana	1
78.	Analisis Proses Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk, Personel, Halal, Pangan Organik	Pelaksana	1

(1)	(2)	(3)	(4)
79.	Analisis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat	Pelaksana	1
80.	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Pelaksana	1
81.	Pengelola Ketahanan Pangan	Pelaksana	1
82.	Pengelola Pola Pangan Harapan	Pelaksana	1
83.	Pengelola Keamanan Pangan Segar dan Pangan Jajanan Anak Sekolah	Pelaksana	1
84.	Analisis Ketahanan Pangan - Ahli Muda	Fungsional	2
85.	Analisis Ketahanan Pangan - Ahli Pertama	Fungsional	2
86.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	2
87.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Ahli Pertama	Fungsional	2
88.	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian dan Bina Usaha	Administrator	1
89.	Analisis Kapasitas Penyuluh	Pelaksana	1
90.	Analisis Bimbingan Usaha	Pelaksana	1
91.	Analisis Peningkatan Usaha Pertanian dan Agribisnis	Pelaksana	1
92.	Analisis Informasi Pasar Hasil Pertanian	Pelaksana	1
93.	Pengelola Administrasi Sistem Informasi Penyuluh Pertanian	Pelaksana	4
94.	Pengelola Program Penyuluhan	Pelaksana	1
95.	Pengelola Bahan Database Kelembagaan Petani	Pelaksana	1
96.	Pengelola Database Profesi SDM Pertanian	Pelaksana	1
97.	Pengelola Teknologi Hasil Pertanian	Pelaksana	1
98.	Analisis Pasar Hasil Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	2
99.	Analisis Pasar Hasil Pertanian - Ahli Pertama	Fungsional	2
100.	Analisis Pasar Hasil Pertanian - Terampil	Fungsional	2
101.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Ahli Pertama	Fungsional	1
102.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian - Terampil	Fungsional	1
103.	Penyuluh Pertanian - Ahli Muda	Fungsional	29
104.	Penyuluh Pertanian - Ahli Pertama	Fungsional	75
105.	Penyuluh Pertanian - Penyelia	Fungsional	10

(1)	(2)	(3)	(4)
106.	Penyuluh Pertanian - Mahir	Fungsional	20
107.	Penyuluh Pertanian - Terampil	Fungsional	31
108.	Penyuluh Pertanian - Pemula	Fungsional	28
UPT Balai Benih Pertanian			
109.	Kepala UPT Balai Benih Pertanian	Pengawas	1
110.	Kcpala Sub Bagian Tata Usaha	Pengawas	1
111.	Penguji Coba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Holtikultura	Pelaksana	1
112.	Pengelola Keuangan	Pelaksana	1
113.	Pengelola Barang Milik Negara	Pelaksana	1
114.	Pengelola Teknologi Perbenihan	Pelaksana	2
115.	Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-buahan Serta Sayuran	Pelaksana	2
116.	Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil dan Kultur Jaringan	Pelaksana	2
117.	Pengelola Perkebunan dan Kehutanan	Pelaksana	1
118.	Pengelola Usaha Tani Perkebunan dan Kehutanan	Pelaksana	1
119.	Pengadministrasi Umum	Pelaksana	3
120.	Petugas Keamanan	Pelaksana	2
121.	Pramu Kebersihan	Pelaksana	2

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN